

Kata kunci: **Usia, Jenis Kelamin, Strata Pendidikan, Bidang Pendidikan.**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek

hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah Negara (UU No. 32 Tahun 2004).

Dalam penjelasan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipaparkan bahwa penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagian dari kekuasaan pemerintah; dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintahan daerah yaitu dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

Pembentukan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Sejak dikeluarkan dan diberlakukannya berbagai perundang-undangan dan produk hukum yang mengatur dan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab kepada kepala daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat merupakan satu kebutuhan mendesak yang mesti diwujudkan oleh pemerintah saat ini secara transparan, akuntabel, efisien dan ekonomis (Banu Witono, 2003: 152).

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo UU 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah membuka peluang yang sangat luas untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD (UU Nomor 32 Tahun 2004). Berdasarkan ke-dua UU dan dilengkapi oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa otonomi daerah maupun desentralisasi ditujukan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Hakekat semangat otonomi ini harus tecermin dalam peneglolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan kata lain, daerah mempunyai kewenangan untuk merencanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan seluruh sumber penerimaan daerah kepada masyarakat melalui DPRD tanpa adanya intervensi Pemerintah Pusat.

Kedudukan dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ditempatkan paad posisi yang sangat strategis dan penting, karena berdasarkan

UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 40 menyebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukn oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah (Perda).

Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintahan Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu dapat dibangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung. Selanjutnya, dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 mengenai tugas dan wewenang DPRD, bahwa DPRD membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah, selain itu DPRD juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah.

Beberapa kajian dilakukan tentang peran DPRD, khususnya dalam pengawasan keuangan daerah dengan mengkaitkan peranan DPRD dengan latar belakang personal anggota dewan. Banu Witono (2003), melakukan penelitian tentang Pengaruh Latar Belakang Personal dan Budaya Politik terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel latar belakang personal dengan dimensi jenis kelamin, usia, strata pendidikan, bidang pendidikan dan pengalaman politik tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Faktor budaya politik sebagai variabel independen, ditemukan berpengaruh secara signifikan terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, sedangkan hasil pengujian pengaruh moderasi budaya politik memperkuat hubungan antara latar belakang personal dan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, terutama dimensi usia, strata pendidikan dan pengalaman politik.

A. Ika Rahutami dan Benedictus Karno Budiprasetyo (2003) melakukan penelitian tentang peranan budaya organisasi dan *individual knowledge management* terhadap kesiapan organisasi dan aparat pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan desentralisasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan individu akan mempengaruhi pembentukan karakter individu untuk bersikap, selain itu pengetahuan individual akan mempengaruhi kemampuan *knowledge management* dari organisasi sehingga mampu atau tidak mampu melaksanakan desentralisasi dan berbagai konsekuensinya. Penelitian tersebut juga menguji perbedaan antar persepsi

ideal dengan persepsi riil yaitu jenis kelamin dan jenis pendidikan responden. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat persepsi kenyataan (berdasarkan perbedaan gender) pada variabel pengetahuan individual (indikator penyebaran dan manfaat pengetahuan) dan pada variabel budaya organisasi (berdasarkan perbedaan pendidikan).

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, penulis ingin mereplikasi penelitian tersebut. Akan tetapi terdapat perbedaan, antara lain:

1. Periode penelitian. Penelitian ini dilakukan pada periode jabatan 2004-2009, sedangkan penelitian terdahulu pada periode sebelum tahun 2004.
2. Daerah penelitian. Penelitian ini mengambil daerah penelitian di Kabupaten Karanganyar, sedangkan penelitian sebelumnya mengambil daerah penelitian se-eks Karesidenan Surakarta dan Kota Semarang.
3. Penelitian ini lebih berfokus pada sisi latar belakang personal (jenis kelamin, usia, strata pendidikan dan bidang pendidikan) dengan pertimbangan bahwa latar belakang individu merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENGARUH LATAR BELAKANG PEESONAL TERHADAP PERAN DPRD DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH”**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah latar belakang personal (jenis kelamin, usia, strata pendidikan dan bidang pendidikan) berpengaruh terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah ?”

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Peranan DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dalam masa jabatan 2004 sampai dengan 2009.
2. Penelitian di wilayah Kabupaten Karanganyar.
3. Latar Belakang Personal yang diangkat dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, strata pendidikan dan bidang pendidikan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh latar belakang personal (ditinjau dari jenis kelamin, usia, strata pendidikan dan bidang pendidikan) terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan informasi mengenai faktor faktor yang mempengaruhi terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Sebagai bahan masukan bagi DPRD dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja DPRD bagi pihak terkait.
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan pemerintah daerah, khususnya akan meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah, guna mewujudkan *Good Governance*.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi uraian secara sistematis mengenai tinjauan pustaka, tentang peran DPRD, fungsi, tugas dan wewenang DPRD, keuangan daerah, pengawasan keuangan daerah, latar belakang personal dan peran DPRD, tinjauan penelitian sebelumnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi uraian secara terinci mengenai rancangan penelitian, yang meliputi: jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum DPRD Kabupaten Karanganyar dan hasil analisis data serta pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis data, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pergeseran paradigma sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, memberikan implikasi terhadap perubahan sistem manajemen pembangunan daerah. Jika dalam sistem se#ntralistis peran pemerintah pusat sangat mendominasi perumusan kebijaksanaan pembangunan daerah, maka sebaliknya dalam sistem desentralistis kewenangan tersebut hijrah ke daerah.

Dalam manajemen pemerintahan modern yang memberi ruang ekskresi secara luas pada partisipasi masyarakat, masalah mendasar yang perlu diketahui dalam pembangunan daerah adalah menentukan peran (*role*), yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pembangunan daerah bersama masyarakat.

Ada empat peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah (Badrul Munir, 2002: 207) pertama, *entrepreneur*, dengan perannya